

## DINAMIKA PERKEMBANGAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG TRANSISI HIJAU

**Rasidah Novita Sari<sup>(a,1)</sup>, Elfrida Yuliar Rasyidin<sup>(b,1)</sup>, Muhammad Hafizd Abilla<sup>(c,1)</sup>, Ramanda Setiawan<sup>(d,1)</sup>**

<sup>1</sup> Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Indonesia

\*231410116.elfridayuliar@uinbanten.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Korespondensi penulis: [\\*231410116.elfridayuliar@uinbanten.ac.id](mailto:*231410116.elfridayuliar@uinbanten.ac.id)

**Abstract.** Sustainable finance has become a strategic element in driving inclusive and environmentally friendly national development. This article examines the dynamics of sustainable finance development in Indonesia, highlighting the implementation challenges and strategic opportunities in accelerating the transition to a green economy. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method on official documents, scientific journals, and policy reports from related institutions such as the OJK, Ministry of Finance, and international financial institutions. The results of the study show that although Indonesia has initiated various policies such as the Sustainable Finance Roadmap, Green Taxonomy, and the issuance of green sukuk, structural challenges still hamper optimal implementation, including low ESG literacy, regulatory disharmony, and limited bankable green projects. However, great opportunities remain open through community support, fintech development, green investment potential, and cross-sector collaboration. By strengthening regulations, incentives, education, and multi-party synergy, sustainable finance can become a major driver in the development of a resilient, equitable, and environmentally friendly national economy.

**Keywords:** sustainable finance, green economy, ESG, green transition, green sukuk

Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) telah menjadi elemen strategis dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan ramah lingkungan. Artikel ini mengkaji dinamika perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, dengan menyoroti tantangan implementasi serta peluang strategis dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka terhadap dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan laporan kebijakan dari lembaga terkait seperti OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga keuangan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menginisiasi berbagai kebijakan seperti *Sustainable Finance Roadmap*, *Taksonomi Hijau*, dan penerbitan *green sukuk*, tantangan struktural masih menghambat implementasi optimal, antara lain rendahnya literasi ESG, ketidakharmonisan regulasi, dan keterbatasan proyek hijau yang *bankable*. Namun, peluang besar tetap terbuka melalui dukungan masyarakat, perkembangan *fintech*, potensi investasi hijau, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan penguatan regulasi, insentif, edukasi, dan sinergi multipihak, keuangan berkelanjutan dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berketeraan, adil, dan berwawasan lingkungan.

**Kata kunci:** : Keuangan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau, ESG, Transisi Hijau, Green Sukuk

### PENDAHULUAN

Keuangan berkelanjutan telah menjadi pilar penting dalam mendukung agenda pembangunan global, khususnya dalam menghadapi tantangan

perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis ekologis. Di tengah krisis iklim yang semakin nyata, transformasi menuju ekonomi hijau menuntut peran aktif sektor keuangan dalam mengalihkan aliran dana ke proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pendekatan ini dikenal sebagai keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), yaitu sistem pembiayaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan (Masia & Mopangga, 2025).

Di Indonesia, dinamika perkembangan keuangan berkelanjutan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan otoritas keuangan telah mengambil berbagai langkah strategis, seperti peluncuran *Sustainable Finance Roadmap*, penerbitan *green sukuk* dan *green bonds*, serta pembentukan *Taksonomi Hijau Indonesia*. Langkah-langkah ini menjadi pondasi penting dalam mendorong transisi ekonomi nasional menuju arah yang lebih hijau, rendah karbon, dan berdaya saing. Namun, dibalik peluang tersebut, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang menghambat percepatan keuangan berkelanjutan. Diantaranya adalah belum optimalnya integrasi prinsip ESG dalam sistem keuangan, rendahnya literasi masyarakat dan pelaku industri terhadap konsep keberlanjutan, serta keterbatasan data dan regulasi yang belum seragam (Vitriani et al., 2025).

Di sisi lain, peluang untuk mengakselerasi transisi hijau melalui keuangan berkelanjutan juga semakin terbuka. Meningkatnya kesadaran generasi muda dan investor ritel terhadap isu lingkungan menjadi kekuatan pasar baru yang mendorong permintaan atas produk investasi hijau. Selain itu, kemajuan teknologi finansial (*fintech*), dukungan lembaga internasional, serta inisiatif bank syariah dalam menerapkan prinsip *green banking* semakin memperkuat fondasi menuju sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kajian ini, penulis berupaya mengeksplorasi secara komprehensif dinamika perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada tantangan struktural dan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk

mempercepat transisi hijau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi implementasi keuangan berkelanjutan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masa depan ekonomi Indonesia yang hijau dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang menyertainya dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kompleks secara komprehensif berdasarkan data dan konteks yang bersifat naratif dan kontekstual. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta publikasi dari lembaga internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank (ADB). Dokumen kunci yang menjadi dasar analisis antara lain *Sustainable Finance Roadmap* (2021–2025), *Taksonomi Hijau Indonesia* (2022), *Green Sukuk Report*, serta berbagai artikel dan laporan media yang relevan dengan perkembangan *green finance*, prinsip ESG, dan *green banking* di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur, yang bertujuan untuk menggali informasi teoritis dan empiris mengenai implementasi keuangan berkelanjutan serta tantangan struktural yang dihadapi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan cara mengidentifikasi tema, pola, dan kecenderungan dari berbagai dokumen yang dianalisis. Proses analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, hingga penarikan kesimpulan sebagai hasil interpretasi terhadap temuan yang ada. Fokus utama dalam penelitian ini mencakup perkembangan kebijakan dan regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, tantangan dalam

penerapan prinsip ESG dan pembiayaan hijau, serta peluang strategis yang dapat dioptimalkan untuk mendorong transformasi ekonomi nasional menuju arah yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### KEUANGAN BERKELANJUTAN

Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) merupakan pendekatan dalam sektor keuangan yang secara eksplisit mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) ke dalam proses pengambilan keputusan investasi dan manajemen risiko. **Menurut Masia dan Mopangga (2025)**, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam aspek sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari strategi keuangan yang bertanggung jawab. Keuangan berkelanjutan lahir dari semangat pembangunan berkelanjutan, yang secara klasik didefinisikan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Saher & Siddique, 2023). Definisi ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keuangan berkelanjutan tidak hanya menjadi alat untuk mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong transformasi ekonomi yang adil dan inklusif.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan krisis iklim, ketimpangan sosial, dan kebutuhan akan tata kelola yang baik, institusi keuangan mulai mengadopsi praktik yang mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Studi yang dilakukan oleh Rathi et al. (2024) menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan tidak hanya difokuskan pada mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi karbon atau deforestasi, melainkan juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi yang berdampak positif. Hal ini mencakup dukungan terhadap proyek-proyek energi terbarukan,

efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

Lebih lanjut, penerapan prinsip ESG dalam dunia keuangan mencerminkan upaya kolektif untuk mengalihkan pembiayaan dari sektor-sektor yang merusak lingkungan menuju kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Implementasi ESG mencakup evaluasi terhadap kinerja lingkungan perusahaan (seperti penggunaan energi dan emisi karbon), dampak sosialnya (misalnya hubungan dengan masyarakat, hak pekerja, dan inklusi sosial), serta tata kelola perusahaan (termasuk transparansi, struktur dewan direksi, dan etika bisnis). Menurut Nugroho et al. (2019), penerapan standar ESG yang konsisten dalam proses investasi dapat memperkuat ketahanan sistem keuangan global dan menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, keuangan berkelanjutan tidak hanya menjadi tren global, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Di tengah kompleksitas krisis lingkungan dan sosial yang terus berkembang, keuangan berkelanjutan menjadi kerangka kerja penting untuk mendorong transformasi menuju pembangunan yang berdaya tahan, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

## **TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN**

### **• TANTANGAN**

Menurut (Vitriani et al., 2025) Implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural yang kompleks. Salah satunya adalah belum harmonisnya regulasi antar lembaga nasional dan internasional, meskipun OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia. Inkonsistensi ini membuka peluang terjadinya *greenwashing* karena standar ESG yang tidak seragam. Selain itu, keterbatasan data dan rendahnya transparansi pelaporan ESG, terutama di kalangan UMKM, menyulitkan proses penilaian risiko lingkungan dan sosial secara objektif.

Literasi yang rendah terkait keuangan berkelanjutan di kalangan pelaku industri dan masyarakat juga menjadi hambatan. Produk seperti *green bonds* dan sukuk hijau belum dikenal luas, sementara proyek hijau sering dianggap berisiko tinggi dan kurang kompetitif dari sisi return. Minimnya insentif fiskal, seperti subsidi atau skema jaminan risiko dari pemerintah, memperlemah daya tarik pembiayaan hijau. Pengawasan yang lemah terhadap klaim proyek hijau juga meningkatkan risiko *greenwashing*, yang dapat merusak kredibilitas pasar dan menggerus kepercayaan investor. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor diperlukan dalam membangun ekosistem regulasi, insentif, dan edukasi yang mendukung keuangan berkelanjutan secara efektif.

Secara khusus, implementasi *green banking* menghadapi dua tantangan utama: pertama, belum adanya regulasi hukum yang mengikat menyebabkan pelaksanaannya bersifat sukarela dan tidak merata, khususnya di sektor perbankan syariah; kedua, rendahnya kesadaran pelaku usaha, terutama UMKM, tentang pentingnya pembiayaan berbasis lingkungan menyebabkan permintaan terhadap produk hijau masih sangat terbatas.

#### • PELUANG

Menurut (Vitriani et al., 2025) Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, implementasi keuangan berkelanjutan dan *green banking* di Indonesia menunjukkan peluang strategis yang signifikan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan seperti *Sustainable Finance Roadmap*, *Taksonomi Hijau*, dan penerbitan green sukuk serta *green bonds* yang memberi sinyal positif bagi pasar keuangan. Di sisi global, dukungan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan turut menciptakan momentum bagi lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, untuk mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan juga menciptakan pasar baru bagi lembaga keuangan. Bank syariah yang menerapkan prinsip *green banking* berpeluang memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari nasabah yang peduli pada isu lingkungan dan sosial. Di sisi lain, produk inovatif seperti *green sukuk*, pembiayaan hijau, dan tabungan

berbasis keberlanjutan membuka ruang diversifikasi layanan keuangan syariah serta memperluas jangkauan pasar. Kemajuan teknologi digital turut mempercepat adopsi keuangan berkelanjutan melalui *fintech* dan *digital banking* yang mendukung transparansi dan efisiensi. Selain itu, terbuka peluang besar untuk kolaborasi dengan lembaga internasional seperti ADB, World Bank, dan Islamic Development Bank dalam mendukung pembiayaan hijau dan peningkatan kapasitas nasional. Secara keseluruhan, peluang ini menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan, termasuk melalui *green banking*, memiliki potensi besar sebagai pendorong transformasi ekonomi nasional menuju arah yang lebih hijau, inklusif, dan berdaya saing.

## KONSEP EKONOMI HIJAU DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menurut (Lumbanraja & Lumbanraja, 2020) Ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan yang berupaya mengharmonisasikan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Menurut Dogaru (2021), ekonomi hijau adalah sistem kegiatan ekonomi yang mencakup seluruh rantai nilai, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, yang dijalankan dengan prinsip keberlanjutan. Sistem ini tidak hanya menekankan efisiensi dan konservasi sumber daya alam, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial secara simultan. Dengan pendekatan ini, ekonomi hijau berperan dalam mengurangi risiko lingkungan dan defisit ekologis yang dihasilkan dari model ekonomi konvensional berbasis eksploitasi sumber daya secara intensif.

Heshmati (2018) memperkuat perspektif ini dengan menyatakan bahwa model ekonomi hijau adalah bentuk pertumbuhan ekonomi yang kompatibel dengan pelestarian lingkungan, bahkan dapat meningkatkan kualitas ekosistem. Dalam model ini, pembangunan ekonomi tidak dianggap sebagai ancaman terhadap lingkungan, melainkan sebagai peluang untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi bersih dan industri ramah lingkungan. Konsep ekonomi hijau juga menyiratkan pentingnya pembangunan berbasis inovasi, seperti energi terbarukan, sistem produksi

yang efisien sumber daya, serta peningkatan modal alam (*natural capital*) sebagai bentuk investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Karakteristik utama dari ekonomi hijau meliputi rendah karbon, efisiensi energi, inklusivitas sosial, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Perekonomian dalam kerangka ini mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan melalui investasi publik dan swasta yang diarahkan ke sektor-sektor hijau. Investasi ini mencakup infrastruktur ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan air, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Pendekatan ini memerlukan transisi struktural dari sistem ekonomi eksploratif menuju sistem yang lebih resilien, regeneratif, dan adaptif terhadap tantangan global seperti krisis iklim, kelangkaan air, dan penurunan kualitas tanah.

Konsep *Green Growth* atau pertumbuhan ekonomi hijau menjadi turunan langsung dari ide ekonomi hijau. *Green growth* merupakan strategi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berketahanan lingkungan, rendah emisi, dan inklusif secara sosial. Pertumbuhan hijau menolak dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan; sebaliknya, ia mendorong integrasi keduanya melalui efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya, inovasi teknologi bersih, serta reformasi kebijakan fiskal dan kelembagaan. Pemerintah Indonesia telah merespon tantangan ini melalui berbagai kebijakan dan program strategis dalam kerangka *green growth*. Di antaranya adalah pengembangan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), penerbitan *green sukuk* dan *green bond*, serta penguatan regulasi terkait perizinan lingkungan dan insentif fiskal untuk energi terbarukan. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi pendekatan multi-sektor dan multi-aktor, termasuk kerja sama dengan organisasi internasional, pelaku swasta, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan ekonomi hijau. Strategi ini meliputi aspek substansi (penyusunan kebijakan dan regulasi), kelembagaan (pembentukan badan dan koordinasi lintas sektor), dan pembiayaan (mobilisasi investasi hijau).

Implementasi ekonomi hijau juga tidak terlepas dari tantangan besar, terutama dalam negara berkembang. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan teknologi, pendanaan yang terbatas, resistensi pelaku usaha terhadap perubahan, serta kapasitas kelembagaan yang belum optimal. Namun demikian, peluang yang ditawarkan oleh ekonomi hijau juga sangat besar, termasuk penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau, peningkatan daya saing industri melalui efisiensi energi, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang semakin menuntut keberlanjutan. Dengan demikian, ekonomi hijau bukan sekadar konsep normatif, melainkan arah baru pembangunan nasional dan global yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ekonomi hijau memberikan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sekaligus merespons secara strategis ancaman perubahan iklim dan degradasi ekologis yang semakin mengkhawatirkan.

## TANTANGAN DAN PELUANG TRANSISI HIJAU

### • TANTANGAN

Menurut (Nurhakiki & Ivanka, 2025) Transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia menghadapi dinamika dan tantangan yang kompleks, seiring upaya negara ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya ketergantungan terhadap sektor-sektor berbasis eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan dan perkebunan skala besar, yang sering kali tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Di sisi lain, penggunaan energi fosil masih mendominasi, dengan kontribusi energi terbarukan yang relatif kecil dalam bauran energi nasional. Meskipun pemerintah telah menetapkan target ambisius terkait energi terbarukan, hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, investasi yang belum optimal, dan resistensi dari industri-industri besar masih menjadi kendala signifikan.

Selain itu, terdapat ketimpangan kapasitas antara daerah, wilayah perkotaan lebih cepat mengadopsi teknologi hijau dibandingkan daerah

pedesaan dan terpencil, yang masih minim akses terhadap teknologi ramah lingkungan. Keterbatasan literasi masyarakat dan pelaku usaha terkait prinsip ekonomi hijau juga memperlambat proses transisi. Di tingkat kebijakan, inkonsistensi regulasi, lemahnya penegakan hukum lingkungan, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga sering kali menjadi penghambat nyata. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah terpadu dan konsisten dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut.

#### • PELUANG

Menurut (Nurhakiki & Ivanka, 2025) Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia memiliki peluang besar dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti energi surya, angin, air, dan bioenergi, membuka jalan bagi pengembangan energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, pertumbuhan industri hijau, seperti sektor kendaraan listrik, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta pertanian organik, menjadi peluang strategis untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Dinamika global yang mendorong perdagangan dan investasi hijau, termasuk adanya skema pendanaan internasional untuk proyek-proyek berkelanjutan, juga menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk menarik investasi ramah lingkungan. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi kekuatan sosial yang dapat mempercepat adopsi gaya hidup dan pola konsumsi yang lebih hijau. Dengan dukungan regulasi yang semakin mengarah pada insentif hijau, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dapat menjadi kunci untuk mendorong inovasi, investasi, serta transformasi ekonomi yang lebih ramah lingkungan, adil, dan inklusif.

## **HUBUNGAN EKONOMI HIJAU DENGAN KEUANGAN BERKELANJUTAN**

Menurut (Judijanto, 2025) Ekonomi hijau dan keuangan berkelanjutan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan inklusif. Ekonomi hijau mengedepankan pertumbuhan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial, sementara keuangan berkelanjutan adalah sistem pembiayaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi.

Kedua konsep ini saling memperkuat. Keuangan berkelanjutan menyediakan dukungan modal melalui instrumen seperti *green bonds*, sukuk hijau, *ESG funds*, dan *green lending* untuk membiayai proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan dan transportasi rendah emisi. Contohnya, *green bond* yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia digunakan untuk mendanai proyek mitigasi perubahan iklim. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi hijau menciptakan peluang investasi baru yang turut mendorong perkembangan sektor keuangan berkelanjutan. Dengan demikian, keduanya membentuk hubungan simbiosis yang saling menguntungkan.

Dalam praktiknya, kebijakan ekonomi hijau yang diterapkan pemerintah—seperti insentif pajak untuk teknologi bersih, regulasi emisi, dan dukungan terhadap penelitian energi terbarukan—telah mendorong perusahaan manufaktur untuk berinovasi dalam model bisnis, proses produksi, dan desain produk. Namun, di negara berkembang, hubungan antara kebijakan ini dan inovasi berkelanjutan di sektor manufaktur masih belum sepenuhnya dipahami. Sektor manufaktur sendiri menghadapi tantangan besar, seperti intensitas energi tinggi, ketergantungan pada sumber daya alam, dan kompleksitas rantai pasok global, yang membuat transisi menuju keberlanjutan tidak mudah.

Selain itu, dimensi global dari rantai nilai manufaktur juga mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi hijau karena keputusan produksi dan pengadaan dipengaruhi oleh regulasi di berbagai negara. Faktor lain yang juga penting adalah peran konsumen. Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan menciptakan permintaan terhadap produk ramah lingkungan,

sehingga mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi bisnis yang lebih berkelanjutan. Lebih jauh, ekonomi Islam atau ekonomi syariah juga menawarkan pendekatan holistik terhadap pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yang sejalan dengan tujuan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara ekonomi hijau, keuangan berkelanjutan, dan nilai-nilai ekonomi syariah dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan masa depan yang adil, etis, dan berkelanjutan.

## **DINAMIKA PERKEMBANGAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA**

Perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia mencerminkan respon strategis terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial. Konsep keuangan berkelanjutan atau *sustainable finance* mengacu pada pendekatan pembiayaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Hal ini menjadi penting dalam membentuk sistem ekonomi yang tangguh dan inklusif. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Paris Agreement* menjadi kerangka global yang mendorong transformasi sektor keuangan agar lebih adaptif terhadap risiko iklim dan krisis sosial.

**Menurut (Hippe et al., 2023)** Pemerintah Indonesia telah mengadopsi langkah-langkah konkret untuk membangun ekosistem keuangan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pelopor dengan merumuskan **Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015–2019)** dan **Tahap II (2021–2025)**, yang mendorong integrasi prinsip ESG dalam pengelolaan risiko dan investasi lembaga jasa keuangan. Taksonomi Hijau Indonesia versi 1.0 juga diluncurkan pada tahun 2022, yang mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi berdasarkan kontribusinya terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia (BI) mulai memasukkan aspek keberlanjutan dalam

kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran, sementara Kementerian Keuangan mendorong penerbitan *Green Sukuk* dan *Green Bond* sebagai instrumen pembiayaan proyek ramah lingkungan.

Meskipun kerangka kebijakan tersebut menjadi fondasi penting, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, terdapat kesenjangan literasi dan pemahaman ESG di antara pelaku sektor keuangan, terutama di perbankan daerah dan sektor UMKM. Kedua, infrastruktur data ESG yang belum memadai menyulitkan proses verifikasi dan pelaporan proyek hijau. Ketiga, kurangnya proyek-proyek hijau yang *bankable* menghambat aliran pembiayaan ke sektor-sektor yang berpotensi mempercepat transisi energi atau pembangunan berkelanjutan. Keempat, fenomena *greenwashing* atau pelabelan palsu sebagai "berkelanjutan" tanpa dasar yang valid masih menjadi risiko yang mengancam kredibilitas kebijakan.

Namun, prospek keuangan berkelanjutan di Indonesia tetap menjanjikan. Potensi besar terdapat pada sektor energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi bersih, pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan limbah dan air. Akses terhadap pembiayaan internasional juga semakin terbuka, seperti melalui mekanisme *Green Climate Fund* (GCF), *Climate Bonds Initiative* (CBI), dan lembaga multilateral seperti World Bank dan Asian Development Bank (ADB). Selain itu, inovasi teknologi finansial (*fintech*) telah menghadirkan model pembiayaan alternatif seperti *green crowdfunding*, *platform ESG investing*, serta *sustainability-linked loan* yang menghubungkan insentif pembiayaan dengan performa keberlanjutan. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan dan lembaga keuangan di Indonesia telah mulai menerapkan prinsip ESG dalam operasional mereka. Misalnya, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi pionir dalam penerbitan *green bond* dan mendanai proyek infrastruktur berkelanjutan. Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai mengintegrasikan prinsip keuangan berkelanjutan dalam produk pembiayaan dan pengelolaan risiko syariahnya. Di sektor pasar modal, upaya keberlanjutan tercermin melalui pengembangan indeks saham tematik yang menilai kinerja perusahaan berdasarkan kepatuhan terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang sekaligus mendorong

investasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap keberlanjutan.

Untuk mempercepat adopsi keuangan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang holistik dan kolaboratif lintas sektor. Harmonisasi kebijakan antara regulator fiskal, moneter, dan sektor riil harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi. Selain itu, penguatan insentif fiskal, seperti potongan pajak untuk proyek hijau dan dukungan subsidi untuk teknologi ramah lingkungan, dapat mempercepat penetrasi keuangan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas SDM, integrasi data ESG nasional, serta transparansi dalam pelaporan keberlanjutan juga menjadi aspek krusial. Dengan ekosistem kebijakan yang semakin terbentuk dan meningkatnya kesadaran di kalangan pelaku usaha serta masyarakat, keuangan berkelanjutan dapat menjadi katalisator utama dalam transisi ekonomi Indonesia menuju pembangunan hijau yang resilien dan berkeadilan. Peran aktif seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, pelaku pasar, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk membangun sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan generasi masa depan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks namun penuh potensi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam sistem keuangannya. Inisiatif seperti *Sustainable Finance Roadmap*, penerbitan *green sukuk* dan *green bonds*, serta peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon dan inklusif. Upaya tersebut mencerminkan kesadaran bahwa sistem keuangan memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menjawab tantangan perubahan iklim serta ketimpangan sosial.

Namun, implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi ESG di kalangan pelaku industri, regulator daerah, dan

masyarakat umum. Minimnya pemahaman terhadap konsep keberlanjutan membuat adopsi prinsip ESG belum merata, terutama di sektor UMKM dan perbankan daerah. Selain itu, belum tersedianya data ESG yang komprehensif dan standar pelaporan yang konsisten menyebabkan kesulitan dalam melakukan evaluasi risiko dan dampak proyek-proyek hijau secara objektif. Tantangan lain muncul dari kurangnya proyek hijau yang layak secara finansial (*bankable*), lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta terbatasnya insentif fiskal yang mendukung adopsi keuangan hijau.

Meskipun demikian, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, khususnya di kalangan generasi muda dan investor ritel, menciptakan permintaan baru terhadap produk keuangan berbasis keberlanjutan. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan digitalisasi sektor keuangan juga membuka ruang inovasi melalui platform *green investing*, *crowdfunding* hijau, dan *ESG-linked loan*. Lebih lanjut, dukungan dari lembaga keuangan internasional seperti World Bank, ADB, dan Islamic Development Bank memberikan peluang pendanaan dan transfer pengetahuan yang penting bagi penguatan kapasitas nasional. Dalam konteks ekonomi syariah, integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab antargenerasi. Bank syariah di Indonesia berpotensi menjadi pelopor *green banking* dengan pendekatan etis yang mendorong investasi dalam sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan infrastruktur hijau. Dengan demikian, penguatan sinergi antara keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan dapat menjadi model inklusif dalam menjawab tantangan ekonomi dan ekologi secara bersamaan.

Untuk mengoptimalkan seluruh potensi tersebut, diperlukan kebijakan yang holistik dan kolaboratif. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi hijau melalui harmonisasi taksonomi hijau, penguatan insentif fiskal, peningkatan transparansi, serta pengembangan pasar karbon dan kredit hijau. Selain itu, perlu adanya

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di sektor keuangan maupun masyarakat sipil, agar mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip ESG secara sistemik dan berkelanjutan. Dengan fondasi yang mulai terbentuk dan peluang yang terus berkembang, keuangan berkelanjutan di Indonesia memiliki prospek menjadi tulang punggung dalam transisi menuju ekonomi hijau yang resilien, inklusif, dan berdaya saing. Peran aktif seluruh pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas lokal, dan masyarakat akan sangat menentukan arah masa depan pembangunan nasional yang lebih adil, lestari, dan berorientasi jangka panjang.

## **ACKNOWLEDMENT / TERIMA KASIH**

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Gramedia. (2022, September 5). *Pengertian Ekonomi Hijau: Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya*. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-hijau/>
- Hippe, A., Gall, P., Roos, A., & Oberauer, A. (2023). The Future of Finance. *ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHAP II (2021 – 2025)*, 105–114. [https://doi.org/10.1007/978-3-658-41618-8\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-41618-8_6)
- Judijanto, L. (2025). *Evolusi Penelitian tentang Keuangan Berkelanjutan dalam Mendorong Ekonomi Hijau*. 4(01), 40–49.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Green Sukuk Report: Allocation and Impact Report*. <https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Taksonomi-Hijau-Indonesia-2022.aspx>
- Lumbanraja, P. C., & Lumbanraja, P. L. (2020). *Cendekia Niaga Journal of Trade*

*Development and Studies Analisis Variabel Ekonomi Hijau ( Green Economy Variable ) Terhadap Pendapatan Indonesia ( Tahun 2011-2020 ) dengan Metode SEM-PLS Abstrak.*

Nurhakiki, N., & Ivanka, N. A. (2025). “*Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan : Tantangan Dan Peluang ” " Implementation of Green Economic Policy in Realizing Sustainable Development: Challenges and Opportunities ”*. 5(1), 19–23.

Otoritas Jasa Keuangan Writers Community. (2024). *Diorama Keuangan Berkelanjutan Indonesia*. OJK Institute. [https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/BE/uploads/berita/files/file\\_f3c64718-6b4f-4870-9f36-cdbd361722d7-21112024223447.pdf](https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/BE/uploads/berita/files/file_f3c64718-6b4f-4870-9f36-cdbd361722d7-21112024223447.pdf)

Vitriani, N., Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2025). *Transformasi Green Banking dalam Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan*. 03(02), 84–91.